

Kerjasama Korea Selatan –Indonesia dalam Manajemen Bencana Alam (Rekontruksi Aceh Pasca Tsunami Samudera Hindia)

Ady Muzwardi*
ady.muz16@gmail.com

Abstract

Natural Disasters is a part of media diplomacy and cooperation between nations, strengthening disaster preparedness for effective response at all levels. In coping with disasters, national resources could be overwhelmed, especially in the event of large-scale disasters. In this respect, bilateral and regional cooperation is of particular importance, and this is part of the Korean Indonesian relations. The political dialogue also intends to foster closer cooperation on humanitarian and activities between the Indonesia and Korean.

The tsunami in Aceh serves as an example of media diplomacy between the two nations as part of global cooperation. The development of political, social and culture cooperation through reconstruction efforts, programs and projects in Aceh has become a strength in the diplomatic relations between South Korea and Indonesia. This research aims to share knowledge and exchange best practices and to be able to work together in the event of major disasters.

Keywords: Natural Disasters, diplomacy, reconstruction.

*FISIP, Universitas Maritim Raja Ali Haji

A. Latar Belakang

Secara Sejak tahun 1600 sampai dengan tahun 2007, Indonesia telah mengalami 184 tsunami besar. Apabila kita melihat sumber penyebab terjadinya tsunami tersebut, hampir 90% kejadiannya disebabkan oleh gempa bumi di laut, 9% diakibatkan oleh letusan gunung api dan 1% karena tanah longsor bawah laut.¹

Tsunami terbesar di Indonesia terjadi pada 26 Desember 2004 dan menjadi salah satu tsunami terbesar di muka bumi. Tsunami tersebut menghantam pantai barat Sumatra dan menyebabkan korban jiwa lebih dari 227,000 serta menghancurkan berbagai fasilitas dan tempat tinggal. Lebih dari 14 negara di sepanjang Samudera Hindia terkena dampak tsunami tersebut. Secara cepat, setelah terjadi tsunami, operasi bantuan yang tidak terduga dimulai. Bantuan tersebut mengalir melalui ratusan negara dan lembaga bantuan internasional dari 130 negara yang berkontribusi terhadap program bantuan darurat yang massive.² Secara cepat operasi bantuan tersebut berjalan untuk pembangunan kembali infrastruktur di Aceh. Di bulan April 2005 pemerintah Indonesia

mengeluarkan sebuah *'Master Plan'* untuk mengarahkan rehabilitasi dan rekonstruksi kembali Aceh dan disaat bersamaan Presiden Indonesia membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), yang bertugas untuk mengkoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi kembali Aceh.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Kerjasama Korea Selatan-Indonesia Dalam Manajemen Bencana Alam dalam Rekonstruksi Aceh Pasca Tsunami Samudera Hindia.

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kerjasama Korea Selatan-Indonesia Dalam Manajemen Bencana Alam dalam Rekonstruksi Aceh Pasca Tsunami Samudera Hindia.

D. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu menganalisa permasalahan dari sudut pandang atau bahan pustaka. Desain penelitian ini lebih menitikberatkan pada data

¹ Latief, Hamzah, DKK.2000. *Tsunami Catalog and Zones in Indonesia*. Vol 22. Tohoku University

² UNEP.2007 *'Environment and Reconstruction in Aceh: Two years after the tsunami'*. United Nations Environment Programme publication

sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis.

E. Kerangka Teori

1. Diplomasi Bencana

Diplomasi Bencana menggabungkan dua kata kunci. Berdasarkan kamus Oxford, definisi bencana adalah “suatu kejadian kecelakaan atau penderitaan yang disebabkan oleh perubahan alam yang berdampak kerusakan besar atau berdampak pada hilangnya nyawa manusia” (oxforddictionaries.com). Kata kedua adalah “diplomasi”, kata diplomasi memiliki definisi yang berlawanan dengan perang, diplomasi bagian dari negosiasi dengan sisi politik yang kuat. Saat kedua kata tersebut digabung menjadi jawaban dari pertanyaan terkait keterlibatan atau kehadiran dari aktor internasional dalam konflik/bencana.³

Semua Diplomasi Bencana membuktikan sejauh ini hubungan

aktivitas dalam bencana yang dapat menjadi katalis dari diplomasi. Hubungan yang terjadi antar aktor dalam keadaan bencana dapat menciptakan diplomasi. Dalam jangka pendek (1 minggu atau 1 bulan) dampak diplomasi yang terkait aktivitas penanggulangan bencana dapat berakibat terciptanya hubungan positif. Diplomasi, pembentukan lembaga rekonsiliasi merupakan bagian dari diplomasi baik negosiasi formal.⁴

Menurut Louise K. Comfort, isu bencana sekarang ini menjadi isu yang sangat krusial bagi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia. Bencana harus didefinisikan secara lebih luas, tidak hanya sebatas isu bencana alam semata, namun juga bencana penyakit ataupun isu pemanasan global. Pendefinisian bencana sebagai isu global diharapkan akan meningkatkan empati dari masyarakat dunia untuk terlibat bersama menyelesaikan problem bencana.

Disaster Diplomacy examines the role of disaster-related

³ Jonsson, C. and Aggestam, K. 2009. “Diplomacy and Conflict Resolution.” The SAGE Handbook of Conflict Resolution, eds. Bercovitch, J., Kartman, W. I., and Kremenjuk, V. Hal. 33-51

⁴ Kelman, I. 2007. “Disaster diplomacy: Can tragedy help build bridges among countries?” UCAR Quarterly, Fall 2007, p. 6.

*activities not just in international affairs and international relations, but also in political conflict not involving more than independent state. Disaster Diplomacy also embraces a wide definition of "disaster", not just rapid-onset events such as earthquakes and industrial explosions, but also events which are more diffuse in space and time such as droughts, epidemics, and global changes. These latter events have been termed "chronic disaster", "creeping changes", and "disaster conditions" amongst other terms"*⁵

Studi kontemporer yang dilakukan oleh I. Kelman menunjukkan bahwa bencana tidak selalu menjadi faktor yang buruk bagi masyarakat, namun dalam batas tertentu dapat dikelola untuk menyelesaikan persoalan-persoalan politik dan konflik yang selama ini tak terpecahkan, baik dalam konteks persoalan dalam level nasional

maupun antara Negara. Argumen besar dari Kelman adalah bencana justru memberikan ruang yang besar bagi pihak-pihak yang memiliki potensi sebagai daerah yang rawan bencana untuk mencari ruang yang bisa dikerjakan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan dari bencana alam itu sendiri.

Studi Kelman tentang semakin menunjukkan fungsionalitas diplomasi bencana alam. Dalam studinya juga menunjukkan bahwa bencana alam juga dapat dikelola untuk menjadi ruang bagi peningkatan kerjasama politik, ekonomi, sosial budaya yang lebih luas. Negara-negara yang tergolong sebagai daerah yang rawan bencana atau potensial mengalami bencana alam, yang sebelumnya tidak melakukan kerjasama yang intensif, bahkan cenderung bermusuhan secara politik, kemudian memilih melakukan kerjasama untuk mengurangi resiko dan dampak bencana.⁶

2. Rekonstruksi

⁵Ilan Kelman.2002."Disaster Diplomacy How Disasters Affect Peace and Conflict".Routledge.2011. p.15

⁶ Surwandono, Herningtyas.2013. "Peningkatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah Propinsi DIY dalam Melakukan Diplomasi Bencana Alam".FISIPOL UMY. Hal 8

Rekonstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengembalian seperti semula. Secara khusus arti rekonstruksi dalam Penanggulangan bencana dan mitigasi Menurut KBBI ekonstruksi (reconstruction): Adalah program jangka menengah dan yang jangka panjang meliputi perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya. || rekonstruksi : Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. || rekonstruksi : Rekonstruksi adalah tahap pembangunan kembali semua sarana dan prasarana agar kembali berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, dan bangkitnya peran masyarakat dalam semua aspek kehidupan. B.N Marbun Rekonstruksi adalah

pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula; Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan berdasarkan penilaian kerusakan dan kerugian yang dilengkapi dengan penilaian kebutuhan pemulihan kemanusiaan masyarakat korban bencana untuk memperoleh perkiraan kebutuhan pemulihan pasca bencana. Keterkaitan antara penilaian kerusakan dan kerugian dengan penilaian kebutuhan pemulihan kemanusiaan memberikan umpan balik bagi kebutuhan pemulihan dengan menempatkan masyarakat korban bencana dan lingkungannya sebagai sasaran pemulihan pasca bencana.

Tabel 1. Rekonstruksi Pasca Bencana

<i>Disaster assessment</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Rapid assessment • Preliminary damage assessment • Site assessment 	<ul style="list-style-type: none"> • Victims' needs assessments • "Lessons learned"
<i>Short-term recovery</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Impact area security • Temporary shelter/housing • Infrastructure restoration • Debris management 	<ul style="list-style-type: none"> • Emergency demolition • Repair permitting • Donations management • Disaster assistance
<i>Long-term reconstruction</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Hazard source control and area protection • Land-use practices • Building construction practices • Public health/mental health recovery 	<ul style="list-style-type: none"> • Economic development • Infrastructure resilience • Historic preservation • Environmental recovery • Disaster memorialization
<i>Recovery management</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Agency notification and mobilization • Mobilization of recovery facilities and equipment • Internal direction and control • External coordination • Public information 	<ul style="list-style-type: none"> • Recovery legal authority and financing • Administrative and logistical support • Documentation

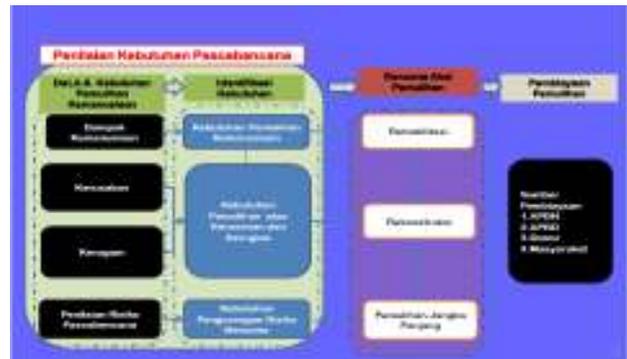
(Sumber : Lindell. 2013. *Recovery And Reconstruction After Disaster*.Springer. Texas. Hal 815)

Rekonstruksi pasca bencana memerlukan dana yang besar sehingga negara-negara yang mengalami bencana alam yang besar memerlukan kerjasama dengan negara-negara donor. Fase rekonstruksi pasca bencana dimulai dari proses penilai kebutuhan dilapangan (*assessment*) fungsi *assessment* sangat penting dalam rekonstruksi pasca bencana, melalui *assessment* dampak darurat pasca bencana dapat diidentifikasi terutama untuk membangun kembali rumah korban dan fasilitas umum lainnya.

Pembangunan kembali memerlukan pembuatan program yang dirancang dari kerjasama negara donor dengan negara yang mengalami bencana. Konsep rekonstruksi pada umumnya dimulai dari perencanaan sektor yang memiliki kebutuhan paling mendasar sehingga pembuatan program rekonstruksi dibantu dengan kemudahan dari regulasi yang ada dan pelaporan keuangan yang transparan dan memiliki akuntabilitas. Untuk tenaga ahli

dalam rekonstruksi banyak mengambil dari negara donor sebagai bagian dari kerjasama yang bukan hanya memberikan bantuan dana tetapi juga tenaga ahli.

Gambar1. Proses Penilaian Kebutuhan Pasca bencana dan Penyusunan Rencana Aksi



Sumber: BNPB.2014.Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi kabupaten aceh tengah dan bener meriah tahun 2013 – 2014. Hal 62

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Diplomatik Korea Selatan dan Indonesia

Indonesia dan Korea Selatan telah menunjukkan hubungan yang erat sejak pembentukan hubungan diplomatik pada tahun 1973. Hubungan baik yang terjalin, salah satunya dibuktikan pada tahun 2012, sekitar 300.000 warga negara Korea

Selatan mengunjungi Indonesia dan 149.000 warga negara Indonesia mengunjungi Korea Selatan.⁷

Hubungan kenegaraan antara Indonesia dan Korsel telah berjalan sejak keduanegara tersebut menandatangani persetujuan pembukaan hubungan diplomatik kenegaraan tingkat konsuler pada 1966. Sebagai langkah pertama dimulainya hubungan kenegaraan resmi antara Indonesia-Korea Selatan tingkat konsuler tersebut, adalah dengan dibukanya banyak kesempatan bagi kedua negara untuk bekerja sama di berbagai bidang demi tercapainya kepentingan kedua negara.

Total perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan pada periode Januari-Februari 2013 sebesar US\$4.415,38 juta, turun 16,64% dibanding periode Januari-Februari 2012, yang tercatat US\$5.296,89 juta. Total perdagangan periode Januari-Februari 2012 tersebut, terdiri dari ekspor Indonesia ke Korea Selatan sebesar US\$2.188,82 juta yang turun 25,21% dibanding periode yang sama tahun 2012 yang mencapai US\$2.926,45 juta, dan

impor Indonesia dari Korea Selatan sebesar US\$2.226,56 juta juga turun 6,07% dibanding periode yang sama tahun 2012, yang tercatat sebesar US\$2.370,44 juta. Neraca perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan defisit bagi Indonesia sebesar US\$37,73 juta. Sementara itu, pada periode yang sama tahun 2012, Indonesia berhasil mencatatkan surplus sebesar US\$556,01 juta.

Pada periode Januari - Februari 2013 produk ekspor non-migas utama Indonesia ke Korea Selatan adalah barang-barang tambang (batubara, nikel, tembaga, dll), karet alam, bahan kimia, produk kayu, benang, dan peralatan listrik rumah tangga. Penurunan permintaan beberapa barang tambang Indonesia dari Korea Selatan disebabkan pengalihan impornya ke negara-negara lainnya seperti Australia, Jepang, dan Amerika Serikat.

Hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan terus mengalami perkembangan dan peningkatan yang cukup signifikan di berbagai bidang dari tahun ke tahun. Hubungan yang erat ini terlihat dengan adanya peningkatan kerjasama yang pesat yang tercermin dari semakin bertambahnya ikatan kerjasama

⁷<http://ipk.lipi.go.id/berita/208-indonesia-korea-selatan-semakin-mantapkan-hubungan-diplomatik>. diakses 16 Oktober 2016

antara kedua negara di berbagai bidang yang mencakup politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan sosial budaya.

Indonesia dan Republik Korea mendirikan hubungan diplomatik pada tanggal 17 September 1973. Kemitraan strategis kedua negara mulai dijalin sejak 4 Desember 2006. Kerjasama kedua negara mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir sebagai hasil dari *summit diplomacy*, konsultasi, dan komunikasi pada tataran *working level* serta pertukaran antar-masyarakat yang intensif.

Republik Korea saat ini tercatat sebagai mitra dagang terbesar keempat dan investor asing terbesar ketiga Indonesia. Pada tahun 2012, volume perdagangan kedua negara adalah sebesar US\$27,02 milyar. Sementara investasi Republik Korea di Indonesia mencapai USD1,94 milyar, atau naik lebih dari 55% dari tahun sebelumnya.

Bentuk diplomasi Korea Selatan melalui diplomasi publik, yang bertujuan untuk menjadi negara yang paling dicintai di dunia. Upaya diplomasi Korea Selatan, dipelopori dengan cara mempromosikan TV drama Korea dan music K-pop

global, namun negara ini juga meluncurkan berbagai macam proyek-proyek publik diplomasi atas dasar pendanaan pemerintah termasuk proyek penanganan bencana alam, dimana untuk tahun fiskal 2014 di bawah pemerintahan Geun-hye nilainya sekitar 50% lebih tinggi dari tahun sebelumnya, pada 9 miliar won (sekitar ¥870.000.000).⁸

Dengan ekonomi yang terus berkembang dalam beberapa dekade terakhir, Korea Selatan menjadi salah satu "Macan Asia" dengan menjadi pemain terkemuka di kawasan Asia. Dengan hubungan bisnis dan perdagangan di seluruh dunia, Korea Selatan berjuang untuk menjadi salah satu pusat ekonomi Asia yang lebih terpadu bekerjasama dengan Indonesia. Fokus kerjasama Korea Selatan lebih menekankan pada strategi promosi yang bersifat diplomatik dengan fokus yang lebih global. Korea Selatan memiliki lima tujuan menuju diplomasi global yang berorientasi masa depan yaitu:

⁸Kwong Yongseok 2014 annual report - Korea Foundation

1. Konsolidasi hubungan diplomatik Korea dengan negara-negara tetangganya.
2. Memperluas upaya diplomatik Korea di wilayah lain.
3. Konsolidasi upaya diplomatik multilateral Korea.
4. Dukungan untuk pengembangan masyarakat Korea di luar negeri.
5. Mengejar aktif diplomasi budaya.

Fokus-fokus kerjasama Korea Selatan menjadi peluang kerjasama diantara Indonesia dan Korea Selatan terutama sebagai bentuk konsolidasi hubungan Korea Selatan dan Indonesia.

Tabel 1 Bantuan Korea (ODA) ke Indonesia: 2006-2010

Year	2006	2007	2008	2009	2010	Tot al
Loans	53.0	-	58.9	58.0	140.0	309.9
Grants	24.0	24.1	21.2	16.6	18.4	104.3
Total	77.0	24.1	80.1	74.6	158.4	414.2

Sumber: <https://data.oecd.org/korea.htm>. diakses 16 Oktober 2016

Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) yang telah memasuki negosiasi putaran ketiga diharapkan dapat mendorong pencapaian target perdagangan bilateral sebesar USD50 milyar pada tahun 2015 dan USD100 milyar tahun 2020. Dalam kaitan ini, IK-CEPA merupakan kerangka dan modalitas kerja sama saling menguntungkan di bidang ekonomi secara komprehensif dan tidak hanya di sektor perdagangan.

Selain isu bilateral, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandang mengenai situasi strategis di kawasan, khususnya terkait Semenanjung Korea. Kedua Menlu juga sepakat untuk mempererat kerja sama di forum regional dan internasional, antara lain dalam kerangka ASEAN-ROK, ASEAN Plus Three, ARF, EAS, FEALAC, dan APEC.⁹

2. Strategi Partnership Korea-Indonesia dalam Rekonstruksi Aceh

⁹Tempo.com. 2013. "Indonesia-Korea Selatan Tingkatkan Hubungan". Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2013/06/13/118488162/Indonesia-Korea-Selatan-Tingkatkan-Hubungan> diakses pada tanggal 14 Oktober 2016

Strategi *partnership* bertujuan untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional 2005-2005 (RPJMN) dan *Master Plan* untuk Akselerasi dan Ekspansi Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). *Master Plan* tersebut menjadi tampilan dari kerangka kerja dalam penguatan hubungan bilateral Korea dan Indonesia melalui Deklarasi Kerjasama dalam strategi *Partnership* sebagai media untuk mempromosikan persahabatan dan kerjasama di abad yang ditandatangani tanggal 4 Desember 2006 oleh kedua pimpinan negara. Implementasi dari deklarasi tersebut melalui pembentukan komite bersama dalam kerjasama ekonomi dan pembentukan *Working Level Task Force*.¹⁰

Kerjasama pembangunan Korea untuk Indonesia (2006-2010) secara total diperkirakan US\$414.2 juta (US\$309.9 juta dalam bentuk dana

konsesi dan US\$104.3 juta dalam bentuk komitmen anggaran) yang telah dialokasikan untuk Indonesia dalam periode 2006 sampai 2010 (rata-rata dengan dana rutin US\$83 juta). total bantuan dana Korea (ODA) untuk Indonesia dalam 2006 (US\$77.0 juta), dan sebagian besar dana untuk rekonstruksi Aceh, hal ini sebagai cemin kerjasama pembangunan kedua negara.

Kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan dalam bidang disaster management lebih menekankan pada pencegahan dan penanggulangan bencana. Salah satunya kerjasamanya adalah pembangunan *Tsunami Response* di wilayah-wilayah rawan bencana tsunami.

Untuk mengatur kerjasama dalam *tsunami response*, Pemerintah Korea Selatan membentuk satuan gugus tugas yang memiliki respon yang cepat untuk mengatur kegiatan bantuan secara sistematis dengan bekerja sama dengan sektor swasta seperti ketika terjadinya bencana Tsunami Samudera Hindia.

Pemerintah Korea Selatan telah merespon secara cepat ketika Tsunami Samudera Hindia terjadi

¹⁰Republic of Korea.2012.Country *Partnership Strategy for the Republic of Indonesia 2012-2015*.

dengan memberikan bantuan sebesar \$50 juta, bantuan tersebut merupakan bantuan terbesar Korea Selatan terhadap bencana di luar Korea Selatan. Dari total jumlah tersebut, USD5 juta dialokasikan untuk bantuan darurat, dan \$45 juta untuk rekonstruksi. Indonesia menerima bagian terbesar (\$17.200.000) dari bantuan Korea Selatan karena menjadi negara yang paling parah terkena dampak bencana tsunami. Pemerintah Korea Selatan telah melaksanakan delapan proyek manajemen bencana alam di Indonesia termasuk melakukan rekonstruksi pembangunan sekolah dan rumah sakit. *The Korea International Cooperation Agency (KOICA)* berperan aktif dalam pengiriman kelompok relawan, dengan mengirim 73 relawan dalam tiga tahap. Para relawan yang terlibat berbagai kegiatan pemulihan bencana, bantuan tenaga kesehatan dan perawatan medis dan *field staff assistance*.

Tabel 1. *KOICA's Response to the Indonesian Tsunami 2004*

<i>Phase</i>	<i>Volum e</i>	<i>Activities</i>
<i>Emer</i>	<i>\$1.3m</i>	<i>- \$0.6M in financial</i>

<i>gency Relief</i>	<i>illion</i>	<i>aid</i> - \$0.7M in supplies including medicine, tents, blanket and water tanks - Emergency relief volunteers to primary school shelters in Banda Aceh
<i>Recovery and Reconstruction</i>	<i>\$15.9 million</i>	1. <i>Project Aid (construction, tech assistance, training)</i> - <i>KOICA model schools in Aceh Barat Daya/Nagan Raya (2006-2007, \$5.4M)</i> - <i>Korea-Indonesia Friendship Hospital in Aceh Barat Daya (2006-2007, \$3.7M)</i> - <i>Rehabilitation of Mangrove Forest & Coastal Area (2006-2008, \$1.8M)</i> 2. <i>Training of BRR/Aceh Government Officers on SME Development (\$0.1M)</i> 3. <i>Provision of</i>

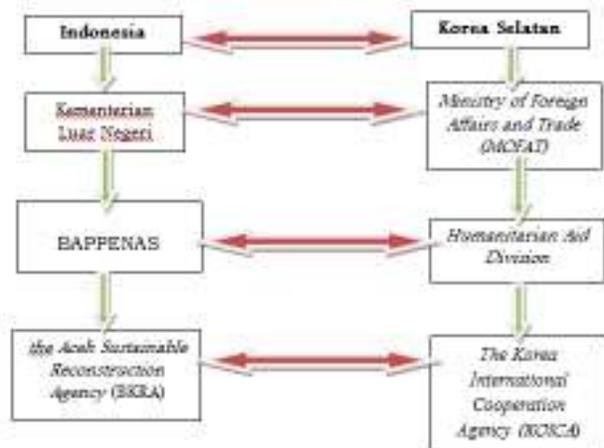
		<p><i>Reconstruction Equipments/Supplies</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tents, Blankets, financial aid for Recovery of Nias Island (\$0.2M)</i> - <i>Relief supplies for refugees and provision of reconstruction equipment in Banda Aceh (\$2 M)</i> - <i>Repairing of Fishing boats (\$0.8 M)</i> - <i>Provision of mobile cranes to rehabilitate harbors in Aceh</i> <p>4. <i>The Project for Establishment of the Disaster Information Dissemination System in Indonesia</i></p>
NGO funding	\$0.7 million	

Sumber: KOICA. 2009. "Evaluation of KOICA's Tsunami Response in Indonesia". Hal.17

Kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan melalui kerjasama kementerian luar negeri Indonesia

dengan *Humanitarian Aid Division* melalui *Ministry of Foreign Affairs and Trade* (MOFAT) Korea Selatan, melalui KOICA. Sistem kerjasama yang dilakukan Korea Selatan dan Indonesia melalui MOFAT lebih khusus kepada lintas departemen yang dilibatkan dalam proses rekonstruksi. *Humanitarian Aid Division* memiliki kerjasama langsung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melalui koordinasi kementerian luar negeri.

Gambar 2. Kerjasama Indonesia-Korea Selatan dalam kerjasama Disaster Management



Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

2. Proyek Rekonstruksi Aceh Pasca Tsunami

Proyek rekonstruksi membutuhkan koordinasi yang kuat

antar lembaga dari kedua belah negara yaitu Indonesia dan Korea Selatan, karena proyek rekonstruksi adalah proyek yang berkelanjutan. Pemerintah Korea Selatan melalui KOICA melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat sampai dengan pemerintahan tingkat lokal di Indonesia. Proyek rekonstruksi Aceh melalui konsultasi antara KOICA dengan BAPPENAS dan BKRA. Beberapa proyek kerjasama Korea Selatan dan Indonesia setelah Tsunami meliputi proyek *The Korea-Indonesia Friendship Hospital*, dimana proyek tersebut bertujuan untuk (1.) meningkatkan bidang kesehatan di Aceh, (2.) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Aceh dengan mentransfer teknik pelayanan medis yang canggih dan (3.) meningkatkan kondisi kesehatan secara keseluruhan di wilayah yang terkena dampak tsunami.

Tabel 2. *Timeline for Korea-Indonesia Friendship Hospital*

Jan. 2005	<i>Korean Government committed to pledge total \$50 million of assistance for 2 yrs. ('05-'07) at</i>
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<i>ASEAN Summit</i>
Jul. 12th, 2005	<i>Reached tentative mutual agreement on the direction of reconstruction project with BRR & Aceh Government personnel</i>
Sept. 7th, 2005	<i>MOU contract notice and request for dispatch of project-related personnel to Banda Aceh</i>
Oct. 10th, 2005	<i>Proposal for project area</i>
Nov. 20th-27th, 2005	<i>Dispatch of KOICA assessment team to Aceh Province</i>
Dec. 13th, 2005	<i>Established project basic framework</i>
Jan. 11th, 2006	<i>Creation of project implementation plan</i>
Apr. 17th, 2006	<i>Exchange of agreement from both governments</i>
Apr. 30th, 2008	<i>Installation of medical equipments</i>
May. 22nd,	<i>Held ceremony for building completion</i>

2008	
------	--

Sumber: Koica, 2009, 33

Selain pembangunan *The Korea-Indonesia Friendship Hospital*, Indonesia dan Korea Selatan juga melakukan kerjasama pembangunan Aceh Model School di wilayah Naga Raya (1 TK, 1 SD, 1 SMP, 1 SMA), tiga sekolah di Aceh Barat Daya (1 SD, 1 SMP, SMA).

2006	
Apr. 17th, 2006	<i>Agreements exchanged between the two governments</i>
Apr. 30th, 2008	<i>School supplies installed</i>
May. 22nd, 2008	<i>Building completion ceremony held</i>

Sumber: Koica 2009, 42

Tabel 3. *Timeline for Aceh Model School Project*

Jan. 2005	<i>Korean government makes commitment for total assistance of \$50 million for two years (2005-2007) to disaster-stricken countries at ASEAN summit</i>
Jul. 12th, 2005	<i>Initial agreement on the reconstruction project selection and direction with BRR and Aceh Government officials</i>
Sept. 7th, 2005	<i>MOU signed and project correspondence from headquarter requested.</i>
Oct. 10th, 2005	<i>Nominates project areas</i>
Jan. 11th,	<i>Establishment of project implementation plan</i>

Kesimpulan

Keseluruhan paparan di atas memberikan gambaran bagaimana kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dalam penanganan bencana alam. Bencana alam dapat menjadi media kerjasama yang kuat bagi kedua negara sebagai bentuk hubungan transnasional. Pembangunan rumah sakit & sekolah di Aceh menjadi media diplomasi Korea Selatan untuk menguatkan hubungan kerjasamanya dengan Indonesia. Koordinasi dalam rekonstruksi di Aceh menjadi harmonisasi hubungan diplomatik kedua negara.

Kerjasama yang erat semakin memperkuat persaudaraan kedua negara, melalui proyek rekonstruksi kerjasama Korea Selatan-Indonesia di Aceh menjadi bentuk konsolidasi hubungan diplomatik Korea Selatan dengan negara-negara mitranya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta. Pustaka Sinar Harapan,
- Latief, Hamzah, DKK.2000. *Tsunami Catalog and Zones in Indonesia*. Vol 22. Tohoku University
- Gaillard, J.-C.Clave, and I. Kelman. “*Wave of Peace?Tsunami disaster diplomacy in Aceh, Indonesia.*” *Geoforum*, Vol.39, no.1. 2008
- Jonsson, C. and Aggestam, K. 2009. “Diplomacy and Conflict Resolution.” *The SAGE Handbook of Conflict Resolution*, eds. Bercovitch, J., Kartman, W. I., and Kremenyuk, V. pp. 33-51
- Kwong Yongseok 2014 annual report - Korea Foundation
- Republic of Korea.2012.Country *Partnership Strategy for the Republic of Indonesia 2012-2015*.
- UNEP.2007 ‘*Environment and Reconstruction in Aceh: Two years after the tsunami*’. United Nations Environment Programme publication

Jurnal / Artikel/Penelitian :

- BNPB. 2014. Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi kabupaten aceh tengah dan bener meriah tahun 2013 – 201.4
- KOICA.“Evaluation of KOICA’s Tsunami Response in Indonesia”. KOICA.2009
- Michael K. Lindell. 2013. *Recovery AndReconstruction After Disaster*.Springer. Texas
- Surwandono, Herningtyas. “Peningkatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah Propinsi DIY dalam Melakukan Diplomasi Bencana Alam”.FISIPOL UMY. 2013
- Website:
<https://www.oxforddictionaries.com/>
- Tempo,com. 2013. “Indonesia-Korea Selatan Tingkatkan Hubungan”. Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2013/06/13/118488162/Indonesia-Korea-Selatan-Tingkatkan-Hubungan> diakses pada tanggal 14 Oktober 2016

<http://ipsk.lipi.go.id/berita/208-indonesia-korea-selatan-semakin-mantapkan-hubungan-diplomatik> diakses pada tanggal 14 Oktober 2016

Wikia.com. 2013. "South Korea's Diplomatic Efforts". Diakses dari http://publicdiplomacy.wikia.com/wiki/South_Korea diakses pada tanggal 14 Oktober 2016

Nippon.com. 2013. "The Age of Public Diplomacy: Soft Power Game in East Asia". Diakses <http://www.nippon.com/en/features/c00721/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2016